



ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK LAYANAN PUBLIK DI BALAI KOTA BUKITTINGGI

ANALYSIS OF OBSTACLES TO THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC SERVICE CONFLICT HANDLING POLICY IN BUKITTINGGI CITY HALL

**Muhammad Febriansyah¹, Zakila Henjel Mizia², Abdul Hamid Gusri³,
Riffa Dwi Berliana⁴, Syamsir⁵**

Ilmu Administrasi Negara, Falkutas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: febriansyahm815@gmail.com¹, azakila24@gmail.com², abdulhamid8969@gmail.com³,
rivvadwii123@gmail.com⁴, syamsirsaili@yahoo.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 21-11-2025

Revised : 23-11-2025

Accepted : 25-11-2025

Pulished : 27-11-2025

Abstract

Research on the historical role of regions in shaping national sovereignty has been widely conducted, yet studies that specifically examine Bukittinggi's unique historical foundation based on five pillars of national struggle and its relevance to center regional dynamics remain limited. This study aims to analyze the historical basis of Bukittinggi as a center of Indonesian sovereignty, explore the contributions of local communities and institutions during the revolutionary period, and identify its relevance to the argument for regional special status. This research employs a qualitative approach with a case study design, involving 12 informants selected through purposive sampling. Data were collected through document analysis, semi-structured interviews, and limited field observations, and analyzed using thematic analysis techniques. The findings indicate that Bukittinggi played a critical role in safeguarding the Republic through the establishment of the Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI), the issuance of ORIPS as an instrument of monetary sovereignty, the Amai-amai gold movement as a form of civic sacrifice, the formation of emergency state institutions, and the contribution of RRI Bukittinggi in maintaining informational sovereignty. These findings enrich the theoretical discourse on historical institutionalism and broaden the understanding of how collective memory of national struggle can serve as a foundation for legitimizing regional special-status policies. This study highlights the importance of recognizing historical contributions in strengthening regional identity and offers policy recommendations for government initiatives aimed at preserving the values of national struggle. The study also opens opportunities for further research on the interplay between historical memory, public governance, and conflict management at the local government level.

Keywords: *Conflict Management Policy, Public Services, Bukittinggi City*

Abstrak

Kajian mengenai peran historis daerah dalam pembentukan kedaulatan negara telah dilakukan dalam berbagai penelitian, namun studi yang secara khusus menelaah konstruksi keistimewaan Bukittinggi berbasis lima pilar perjuangan serta kaitannya dengan dinamika pusat–daerah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan historis Bukittinggi sebagai pusat kedaulatan Republik Indonesia, mengeksplorasi kontribusi masyarakat dan institusi lokal pada masa revolusi, serta mengidentifikasi relevansinya terhadap argumentasi keistimewaan daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 12 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data



dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara semi terstruktur, dan observasi lapangan terbatas, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukittinggi memainkan peran kritis dalam penyelamatan negara melalui keberadaan PDRI, penerbitan ORIPS sebagai instrumen kedaulatan moneter, gerakan emas Amai amai sebagai bentuk pengorbanan sipil, pembentukan institusi negara darurat, serta kontribusi RRI Bukittinggi dalam mempertahankan kedaulatan informasi. Temuan ini memperkaya teori historical institutionalism dan memperluas pemahaman mengenai bagaimana memori kolektif perjuangan dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan keistimewaan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi historis dalam penguatan identitas kota dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan program pelestarian nilai perjuangan. Studi ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai hubungan antara sejarah perjuangan, tata kelola publik, dan manajemen konflik di tingkat pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Penanganan Konflik, Layanan Publik, Kota Bukittinggi

PENDAHULUAN

Fenomena pengakuan terhadap kota-kota bersejarah sebagai entitas dengan kekhususan status administratif menjadi diskursus penting dalam studi tata kelola pemerintahan di Indonesia satu dekade terakhir. Seiring meningkatnya perhatian terhadap rekonstruksi sejarah lokal dan penguatan identitas kebangsaan, berbagai daerah mulai mengajukan legitimasi historis untuk memperoleh status khusus sebagai bagian dari penghargaan nasional. Dalam konteks ini, Kota Bukittinggi menjadi salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis karena rekam jeaknya sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948–1949, sebuah peristiwa yang menurut Rahadian (2020) merupakan momen paling kritis dalam menjaga keberlanjutan eksistensi Republik Indonesia ketika elite nasional berada dalam tekanan militer kolonial. Meskipun demikian, kajian akademik yang secara mendalam mengupas dimensi historis Bukittinggi dalam kerangka kebijakan penanganan konflik publik dan pelayanan pemerintahan masih relatif terbatas.

Penelitian-penelitian mengenai status keistimewaan daerah selama ini lebih banyak menyoroti Yogyakarta sebagai preseden utama (Atmasasmita, 2018; Kurniawan, 2021). Padahal, jejak historis Bukittinggi menunjukkan bahwa kota tersebut tidak hanya berperan sebagai lokasi alternatif pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi negara di mata internasional. Dalam perspektif administrasi publik, keberadaan PDRI tidak sekadar catatan sejarah, melainkan aset politik yang dapat memengaruhi legitimasi kontemporer pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pelayanan dan resolusi konflik. Pandangan ini selaras dengan konsep *historical institutionalism* yang menegaskan bahwa rekam jejak masa lalu berpengaruh pada kapasitas kelembagaan saat ini (Pierson, 2015). Dengan demikian, pengkajian ulang atas sejarah Bukittinggi memiliki relevansi langsung terhadap diskursus kebijakan dan tata kelola layanan publik masa kini.

Sikap peneliti terhadap isu ini berangkat dari pemahaman bahwa penguatan identitas historis suatu daerah seharusnya tidak semata dimaknai sebagai upaya memperoleh status politik tertentu, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan kapasitas resolusi konflik. Perspektif ini didasarkan pada pandangan Ansell dan Torfing (2021) mengenai *collaborative governance*, yang menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk mengelola memori kolektif, legitimasi sosial, dan dinamika historis masyarakat. Dalam konteks Bukittinggi, spirit perjuangan PDRI,



kedaulatan moneter melalui ORIPS, serta peran sipil-militer menjadi modal sosial yang dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti hubungan antara sejarah perjuangan dan legitimasi tata kelola lokal. Misalnya, studi Prasetyo (2019) menunjukkan bahwa identitas historis dapat memperkuat modal sosial yang bermuara pada peningkatan efektivitas pelayanan publik. Namun penelitian tersebut belum memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana dimensi-dimensi historis konkret, seperti kedaulatan moneter atau pengorbanan sipil-militer, dapat dikaitkan dengan manajemen konflik layanan publik di era modern. Selain itu, sebagian besar penelitian mengenai Bukittinggi masih terfokus pada aspek pariwisata sejarah dan belum mengkaji implikasi administratif terhadap tata kelola pemerintahan (Sari & Wicaksono, 2022). Hal inilah yang menimbulkan *gap* penting dalam literatur, sehingga kajian yang mengaitkan sejarah perjuangan Bukittinggi dengan kapasitas birokrasi kontemporer menjadi relevan untuk dilakukan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan kajian sejarah perjuangan daerah dengan teori manajemen konflik modern dan perspektif administrasi publik kontemporer. Pendekatan ini mengacu pada teori *conflict transformation* dari Lederach (2015), yang menekankan bahwa konflik tidak hanya diselesaikan, tetapi ditransformasikan melalui pemaknaan ulang nilai, identitas, dan struktur sosial. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan kerangka *public value governance* sebagaimana dikembangkan oleh Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2017), yang menempatkan nilai historis sebagai bagian dari aset pelayanan publik. Integrasi pendekatan historis-administratif ini belum banyak diterapkan dalam kajian mengenai kota bersejarah di Indonesia, sehingga menawarkan kontribusi baru bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola daerah.

Dalam konteks teoritis, penelitian ini menggunakan dua landasan utama: pertama, teori kelembagaan historis (*historical institutionalism*) yang menjelaskan bagaimana memori kolektif berpengaruh terhadap praktik pemerintahan; kedua, teori manajemen konflik layanan publik yang menitikberatkan pada hubungan antara legitimasi pemerintah, kualitas layanan, dan respons masyarakat terhadap kebijakan (Oktaviani & Putra, 2021). Dengan memadukan kedua teori tersebut, penelitian ini berupaya memetakan bagaimana nilai perjuangan masa lalu dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme modern pelayanan publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fokus penelitian ini juga didorong oleh perdebatan kontemporer mengenai kebutuhan diferensiasi status kota berdasarkan kontribusi sejarahnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa daerah dengan warisan historis kuat cenderung memiliki tingkat partisipasi publik lebih tinggi dan lebih siap menghadapi dinamika konflik sosial (Mahendra, 2020). Namun, bukti empiris mengenai kasus Bukittinggi masih belum banyak tersedia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan dasar akademik bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik yang lebih kontekstual berbasis nilai perjuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai bagaimana dimensi-dimensi historis strategis Bukittinggi dapat memperkuat legitimasi tata kelola layanan publik dan manajemen konflik di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana pengalaman sejarah seperti PDRI, ORIPS, dan inisiatif sipil-militer dapat dibandingkan dengan preseden daerah istimewa lain di Indonesia serta bagaimana nilai perjuangan tersebut dapat



ditransformasikan menjadi *core values* dalam pembangunan kota. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui pendekatan historis yang terintegrasi dengan kebutuhan layanan publik masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana dimensi historis Kota Bukittinggi khususnya peran PDRI, ORIPS, dan inisiatif sipil-militer berkontribusi terhadap legitimasi tata kelola layanan publik serta manajemen konflik di tingkat pemerintah daerah. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa isu yang dikaji bersifat kontekstual, kompleks, dan membutuhkan interpretasi terhadap pengalaman historis serta praktik administratif kontemporer, sebagaimana direkomendasikan Creswell (2018) dalam studi kualitatif kebijakan publik. Desain penelitian yang digunakan adalah *multiple-embedded case study*, yaitu memadukan analisis dokumen sejarah, kebijakan pemerintah daerah, serta praktik layanan publik yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian (Yin, 2018). Partisipan penelitian meliputi 12 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah Kota Bukittinggi, sejarawan lokal, akademisi administrasi publik, dan tokoh masyarakat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria kompetensi historis, pengalaman dalam layanan publik, serta keterlibatan dalam penyusunan kebijakan daerah (Palinkas et al., 2015). Jumlah dan karakteristik partisipan ini dipertimbangkan cukup karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman data dibandingkan representativitas numerik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: analisis dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan terbatas. Instrumen wawancara dirancang menggunakan pedoman berbasis indikator teori *historical institutionalism* dan teori manajemen konflik layanan publik, serta diuji melalui *expert judgment* untuk memastikan konsistensi konten (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Dokumen yang dianalisis mencakup arsip sejarah, kebijakan pemerintah kota, laporan pelayanan publik, serta literatur akademik terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *thematic analysis*, yaitu mengidentifikasi pola makna dari data kualitatif secara sistematis melalui proses pengodean terbuka, aksial, dan selektif (Braun & Clarke, 2019). Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan hubungan antara nilai historis Bukittinggi dan praktik tata kelola pelayanan publik masa kini, serta memformulasikan temuan yang selaras dengan tujuan penelitian. Validitas data dijaga melalui *triangulation of sources* dan *member checking*, yang dinilai efektif dalam meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Bukittinggi sebagai Pusat Kedaulatan Republik Indonesia pada Masa PDRI

Hasil analisis dokumen historis, wawancara informan, serta penelusuran arsip pemerintah menunjukkan bahwa Bukittinggi memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan kedaulatan Republik Indonesia selama Agresi Militer Belanda II. Ketika pimpinan nasional di Yogyakarta ditawan pada 19 Desember 1948, terjadi kekosongan kekuasaan atau *vacuum of power* yang berpotensi menyebabkan Republik kehilangan eksistensi formalnya. Namun, mandat yang ditinggalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden memungkinkan Syafruddin Prawiranegara memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik



Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948. Berdasarkan dokumen primer yang ditelusuri, penetapan Bukittinggi serta wilayah pedalaman Sumatera sebagai pusat pemerintahan darurat bukan hanya keputusan politis, tetapi juga strategis, mengingat kondisi geografis yang sulit diakses pasukan Belanda.

Data lapangan memperlihatkan konsistensi bahwa PDRI berfungsi sebagai pelaksana utama roda pemerintahan negara, termasuk pembuatan kebijakan, penyampaian instruksi militer, koordinasi keuangan, hingga diplomasi. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa keberadaan PDRI menjadi dasar utama bagi pengakuan internasional bahwa Republik Indonesia tidak pernah bubar secara formal. Hal ini ditegaskan oleh bukti bahwa pemerintah darurat tersebut tetap melakukan komunikasi dengan dunia luar melalui jaringan informasi dan komunikasi yang dikendalikan dari Bukittinggi. Sebagai bentuk legitimasi historis, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara (HBN) untuk mengenang pusat kedaulatan negara yang dipindahkan ke Bukittinggi. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa Bukittinggi memiliki peran yang fundamental dan tak tergantikan dalam keberlanjutan Republik Indonesia pada masa krisis tersebut.

2. Bukittinggi sebagai Simpul Kedaulatan Moneter melalui ORIPS

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Bukittinggi tidak hanya menjadi pusat kedaulatan politik, tetapi juga kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Ketika distribusi Uang Republik Indonesia (ORI) dari Jawa terhambat oleh blokade Belanda pada tahun 1947, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mencetak mata uang darurat yang diberi nama ORIDA. Khusus di Sumatera, uang darurat tersebut dikenal sebagai Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS). Melalui penelusuran dokumen administratif dan wawancara, ditemukan bahwa Bukittinggi berperan sebagai pusat pengendalian legalitas, verifikasi, dan jaminan nilai ORIPS.

Temuan ini diperkuat oleh catatan bahwa keberadaan ORIPS memungkinkan roda ekonomi Sumatera tetap bergerak ketika sistem keuangan nasional berada dalam tekanan kolonial. ORIPS digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, kebutuhan logistik, serta mendukung pergerakan pasukan. Selain itu, data menunjukkan bahwa nilai ORIPS tetap dihargai masyarakat karena legitimasi politiknya kuat dan diakui langsung oleh pemerintah darurat yang bemarkas di Bukittinggi. Dengan demikian, temuan memperlihatkan bahwa Bukittinggi memegang fungsi strategis sebagai simpul pertahanan moneter Republik serta sebagai motor stabilitas ekonomi dalam situasi darurat nasional.

3. Pengorbanan Kolektif Masyarakat melalui Gerakan Emas Amai-amai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat lokal Bukittinggi terhadap Republik Indonesia tidak bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui gerakan pengorbanan kolektif yang signifikan. Berdasarkan dokumen sejarah dan catatan lapangan, ditemukan bahwa pada tahun 1947 dibentuk Panitia Pusat Pengumpulan Emas di Bukittinggi atas prakarsa Wakil Presiden Mohammad Hatta. Gerakan ini melibatkan kaum perempuan Minangkabau atau dikenal sebagai Amai-amai dan Bundo Kanduang, yang secara sukarela menyumbangkan emas berupa gelang, kalung, cincin, dan perhiasan adat yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi.



Data kuantitatif menunjukkan bahwa sekitar 14 hingga 15 kilogram emas berhasil dikumpulkan. Emas tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat Avro Anson (RI-003), yang memiliki fungsi strategis dalam diplomasi dan pergerakan logistik Republik. Temuan ini menunjukkan bahwa Bukittinggi tidak hanya menjadi pusat keputusan politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi simbol partisipasi dan pengorbanan sipil dalam menopang perjuangan nasional. Hal ini memperkuat posisi Bukittinggi sebagai wilayah dengan tingkat patriotisme masyarakat yang tinggi dan kontribusi nyata bagi keberhasilan perjuangan kemerdekaan.

4. Bukittinggi sebagai Laboratorium Institusi Negara Darurat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bukittinggi berperan bukan hanya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat pembentukan institusi negara pada masa perang. Berdasarkan telaah dokumen resmi dan arsip pendidikan pemerintahan, ditemukan bahwa pada tahun 1948 Pemerintah Darurat Republik Indonesia mendirikan Akademi Pamong Praja di Bukittinggi. Akademi ini merupakan cikal bakal lembaga kaderisasi aparatur sipil negara yang bertujuan mempersiapkan sumber daya manusia pemerintahan yang berintegritas dan loyal terhadap Republik.

Selain itu, Bukittinggi juga menjadi tempat berdirinya Sekolah Polisi Wanita pertama pada tahun 1948, yang merupakan langkah progresif dalam sejarah kepolisian Indonesia. Inisiatif ini dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan keamanan dan penegakan hukum yang melibatkan perempuan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun berada dalam kondisi perang, Bukittinggi menjadi pusat pembentukan institusi permanen yang berperan dalam membangun fondasi pemerintahan modern. Pada tahun 1954 juga didirikan Kursus Dinas C (KDC) yang kemudian berkembang menjadi APDN Bukittinggi, menegaskan peran kota ini dalam pembentukan kader birokrasi nasional.

5. Peran Strategis RRI Bukittinggi dalam Kedaulatan Informasi

Temuan penelitian dari sumber arsip dan wawancara menunjukkan bahwa RRI Bukittinggi memiliki fungsi strategis sebagai pusat informasi Republik pada masa agresi militer. Di tengah upaya Belanda memutus jalur komunikasi dan menguasai opini publik melalui propaganda, RRI Bukittinggi menjadi satu-satunya corong resmi Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Siaran RRI tidak hanya menyampaikan keberadaan dan kebijakan PDRI, tetapi juga menegaskan bahwa Republik masih berdiri, sehingga memberikan harapan kepada rakyat dan pejuang di berbagai wilayah.

Data juga menunjukkan bahwa keberadaan stasiun radio di Bukittinggi mampu melampaui blokade informasi Belanda. RRI Bukittinggi menyiarkan pesan-pesan motivasi, laporan perkembangan perang, dan maklumat resmi yang berfungsi menjaga moral nasional. Temuan ini menegaskan bahwa Bukittinggi memainkan peran dalam mempertahankan kedaulatan informasi Republik melalui mekanisme penyiaran yang aktif, akurat, dan berkelanjutan.

6. Kesetaraan Preseden Historis antara Bukittinggi dan Yogyakarta

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Bukittinggi dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kesetaraan preseden historis dalam konteks penyelamatan kedaulatan negara pada masa perjuangan kemerdekaan. Yogyakarta berperan sebagai ibu kota Republik Indonesia pada fase



awal revolusi dan menjadi tempat perlindungan pimpinan negara selama beberapa periode. Sementara itu, Bukittinggi menjadi pusat pemerintahan ketika seluruh pucuk pimpinan negara ditahan oleh Belanda.

Data memperlihatkan bahwa kedua daerah sama-sama menjalankan fungsi-fungsi kritis negara dalam situasi darurat, namun dengan karakteristik yang berbeda. Bukittinggi menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh tanpa keberadaan fisik Presiden dan Wakil Presiden, menjadikannya pusat pelaksanaan kedaulatan negara pada masa paling genting. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa Bukittinggi memiliki landasan historis yang setara untuk dijadikan preseden argumentasi keistimewaan sebagaimana Yogyakarta

Visualisasi Data

Tabel 1. Perbandingan Preseden Historis Keistimewaan Yogyakarta dan Bukittinggi

Kriteria Argumentasi	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Bukittinggi (Calon Kota Istimewa)
Peran Kedaulatan Tertinggi	Ibu kota negara; tempat bernaungnya pimpinan nasional (1946–1948 dan Juli 1948–27 Desember 1949)	Ibu kota darurat Republik Indonesia (PDRI), penyelamat kedaulatan negara (19 Desember 1948–13 Juli 1949)
Dampak Historis	Basis kedaulatan politik dan militer	Penjamin eksistensi negara secara de facto dan de jure; diakui melalui Hari Bela Negara
Konteks Lokal	Berbasis institusi Kesultanan	Berbasis pengorbanan sipil, kedaulatan moneter (ORIPS), dan institusi negara darurat

Tabel 1 menunjukkan kesetaraan kontribusi Yogyakarta dan Bukittinggi dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Dalam analisis data, ditemukan variasi pandangan terkait peristiwa PRRI tahun 1958. Meskipun sebagian besar data dokumen dan informan menilai PRRI sebagai bagian integral dari dinamika daerah dan perjuangan, terdapat sebagian kecil pandangan yang memosisikannya sebagai insiden yang tidak mendukung narasi keistimewaan. Dua informan (I02 dan I06) menyatakan bahwa status PRRI sebagai gerakan yang pernah dianggap pemberontakan dapat menjadi pertimbangan untuk tidak memasukkannya ke dalam narasi legitimasi Bukittinggi. Data ini menunjukkan adanya keberagaman persepsi terkait penyusunan sejarah dan identitas daerah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Bukittinggi memiliki struktur historis yang kuat sebagai pusat kedaulatan negara, terutama melalui keberadaannya sebagai lokasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948–1949. Hasil ini relevan dengan tujuan penelitian yang ingin menjelaskan bagaimana dimensi historis strategis memperkuat identitas Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan. Dalam kerangka *historical institutionalism*, pengalaman krisis seperti pendirian PDRI membentuk fondasi legitimasi institusional yang bertahan lama (Pierson, 2015). Temuan mengenai lima pilar historis PDRI, ORIPS, emas Amai-amai, institusi negara darurat, dan peran RRI Bukittinggi menunjukkan bahwa penopang kedaulatan negara tidak hanya terpusat pada kekuatan elite, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan komunikasi publik. Dengan



demikian, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa Bukittinggi menempati posisi strategis yang bukan sekadar geografis, melainkan institusional dan struktural.

Perbandingan hasil penelitian dengan literatur terdahulu menunjukkan beberapa kesesuaian penting. Pertama, temuan tentang peran PDRI dalam menjaga keberlangsungan negara konsisten dengan penelitian Rahadian (2020), yang menegaskan bahwa PDRI merupakan faktor kunci yang memastikan Republik Indonesia tetap eksis secara hukum internasional. Kedua, hasil penelitian tentang ORIPS sebagai instrumen kedaulatan moneter sejalan dengan studi Nugroho dan Wicaksana (2019), yang menyatakan bahwa mata uang darurat berfungsi sebagai alat perlawanan ekonomi terhadap dominasi kolonial. Temuan penelitian ini memperkuat perspektif tersebut dengan menunjukkan peran Bukittinggi sebagai pusat administrasi moneter di Sumatera. Ketiga, data tentang kontribusi Amai-amai mengonfirmasi penelitian Safitri (2018) dan Wulandari (2021), yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam pendanaan dan mobilisasi perjuangan kemerdekaan. Keempat, temuan mengenai PDRI sebagai “laboratorium birokrasi darurat” konsisten dengan analisis Widodo (2020), yang menyatakan bahwa institusi darurat pada masa perang sering kali menjadi embrio kelembagaan permanen di negara-negara berkembang. Penelitian ini melengkapi literatur tersebut dengan menunjukkan pembentukan Akademi Pamong Praja dan Polwan pertama di Bukittinggi.

Temuan mengenai PRRI juga memperlihatkan dinamika historis yang lebih kompleks daripada narasi dominan yang menempatkan PRRI sebagai pemberontakan semata. Beberapa penelitian mutakhir, seperti yang dilakukan oleh Setiawan (2019) dan Suryadinata (2021), menunjukkan bahwa PRRI muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan pembangunan dan ketidakpuasan daerah terhadap sentralisasi negara pada masa awal Republik. Hasil penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menemukan bahwa PRRI merupakan ekspresi aspirasi daerah untuk keadilan fiskal dan representasi politik, bukan keinginan pemisahan diri. Temuan tentang keterlibatan tokoh PDRI seperti Syafruddin Prawiranegara juga memperkuat analisis terdahulu bahwa aktor-aktor politik di Sumatera memiliki komitmen kuat terhadap Republik, meskipun berbeda dalam strategi menyampaikan tuntutan daerah (Natsir, 2022). Selain itu, rekonsiliasi nasional tahun 1961 yang memberi amnesti kepada tokoh PRRI selaras dengan kajian Wirawan (2020) mengenai pola-pola penyelesaian konflik negara daerah di Indonesia yang cenderung menggunakan mekanisme integratif.

Dari perspektif implikasi, temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap kajian identitas daerah dan legitimasi pemerintahan. Penggabungan lima pilar historis menunjukkan bahwa legitimasi suatu kota tidak hanya ditentukan oleh struktur pemerintahan formal, tetapi juga oleh memori kolektif dan kontribusi historis masyarakatnya. Hasil ini memperkaya literatur mengenai *public value governance*, sebagaimana dikemukakan Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2017), bahwa nilai publik dibangun melalui sinergi antara tindakan pemerintah, masyarakat, dan konteks sejarah. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah untuk melakukan penataan identitas daerah berbasis sejarah perjuangan yang terukur dan dapat dipahami secara nasional. Temuan penelitian juga memberi landasan bagi pengembangan kebijakan kota istimewa, khususnya bagi daerah yang memiliki kontribusi historis strategis namun belum diakui secara formal.



Meski demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian sangat bergantung pada dokumen historis dan wawancara mendalam yang bersifat kualitatif, sehingga interpretasi dapat dipengaruhi oleh subjektivitas narasumber dan ketersediaan arsip. Kedua, data mengenai PRRI masih mengandung bias karena narasi resmi pemerintah pada masanya bersifat represif terhadap gerakan tersebut, sehingga beberapa aspek penting mungkin tidak terdokumentasi secara lengkap. Ketiga, penelitian ini belum mengukur dampak langsung narasi historis terhadap kebijakan pelayanan publik kontemporer, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji hubungan tersebut secara lebih empiris. Ke depan, studi longitudinal atau komparatif antar daerah dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana sejarah perjuangan membentuk identitas, legitimasi, dan tata kelola pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bukittinggi memiliki lima pilar historis yang secara signifikan memperkuat posisinya sebagai pusat kedaulatan bangsa pada masa revolusi dan sebagai Kota Perjuangan dalam narasi nasional. Peran PDRI, penerbitan ORIPS, kontribusi emas Amai amai, pendirian institusi negara darurat, serta fungsi RRI Bukittinggi sebagai saluran komunikasi negara membuktikan bahwa pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial Republik tetap berjalan dari wilayah ini pada periode krisis. Temuan ini memperlihatkan adanya kesetaraan substantif antara Bukittinggi dan Yogyakarta sebagai daerah yang berperan dalam penyelamatan negara. Selain itu, dinamika PRRI memperkaya pemahaman mengenai hubungan pusat dan daerah pada masa awal Republik, menunjukkan bahwa aspirasi keadilan dan desentralisasi turut membentuk identitas historis Bukittinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara langsung menjawab tujuan penelitian bahwa landasan sejarah Bukittinggi mempunyai legitimasi kuat untuk digunakan sebagai dasar penguatan identitas daerah dan pengembangan kebijakan pada masa kini.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian historical institutionalism dengan menunjukkan bagaimana memori kolektif dan pengalaman krisis dapat membentuk legitimasi pemerintahan daerah, serta memperluas pemahaman mengenai hubungan antara sejarah perjuangan dan tata kelola modern. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan potensi keistimewaan Bukittinggi berbasis sejarah perjuangan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup sumber data yang terbatas dan ketergantungan pada arsip historis, sehingga rekomendasi bagi penelitian selanjutnya mencakup perlunya studi longitudinal untuk melihat dampak nilai historis terhadap kebijakan publik secara berkelanjutan, serta penelitian komparatif dengan daerah lain untuk memperluas pemahaman mengenai pola pembentukan identitas daerah berbasis sejarah perjuangan.

SUMBER REFERENSI

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance: Strategies and challenges in collaborative innovation*. Oxford University Press.
- Atmasasmita, R. (2018). *Politik hukum otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>



- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). *Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management*. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Kurniawan, R. (2021). *Aspek keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif ketatanegaraan*. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1–18.
- Lederach, J. P. (2015). *The little book of conflict transformation*. Good Books.
- Mahendra, A. (2020). Historical identity and civic engagement: Evidence from Indonesian local governance. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(3), 421–439.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Natsir, M. (2022). Dinamika politik PRRI dan relasi pusat-daerah dalam sejarah Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 16(2), 145–162.
- Nugroho, T., & Wicaksana, A. (2019). Oeang Republik Indonesia dan dinamika ekonomi perang kemerdekaan. *Jurnal Ekonomi & Sejarah Nasional*, 5(2), 113–129.
- Oktaviani, D., & Putra, R. (2021). Manajemen konflik dalam pelayanan publik: Analisis kebijakan dan respons masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 3(1), 22–35.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
- Pierson, P. (2015). *Politics in time: History, institutions, and social analysis*. Princeton University Press.
- Prasetyo, D. (2019). Historical identity and local governance effectiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 101–118.
- Rahadian, F. (2020). PDRI dan keberlangsungan negara: Analisis diplomasi dan legitimasi internasional. *Jurnal Sejarah Nasional*, 8(1), 55–72.
- Safitri, L. (2018). Peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia: Studi kontribusi emas rakyat. *Jurnal Gender & Sejarah*, 10(2), 89–104.
- Sari, D., & Wicaksono, B. (2022). Bukittinggi sebagai kota wisata sejarah: Potensi dan tantangan dalam pengembangan identitas lokal. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 4(1), 33–47.
- Setiawan, T. (2019). PRRI dan relasi kuasa pusat-daerah: Telaah ulang dinamika politik regional Sumatera. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(3), 210–229.
- Suryadinata, L. (2021). Regional rebellions and the politics of centralization: Revisiting PRRI in Indonesian history. *Journal of Asian Political Science*, 27(2), 245–263.
- Widodo, A. (2020). Birokrasi darurat dalam sejarah pemerintahan Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 14–29.
- Wirawan, F. (2020). Resolusi konflik negara-daerah di Indonesia: Analisis amnesti dan abolisi sebagai instrumen integrasi nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 76–93.
- Wulandari, S. (2021). Women's financial contribution in Indonesia's independence war: A socio-historical study. *Journal of Indonesian Social History*, 12(1), 58–73.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.